

**PENGARUH PENALARAN MORAL APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH (APIP) DAN TEKANAN SITUASIONAL TERHADAP
KECENDERUNGAN MELAKUKAN *FRAUD* SAAT MENGAUDIT: SEBUAH STUDI
EKSPERIMEN**

Novita Puspasari

Meutia Karunia Dewi

Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk menguji pengaruh level moral dan tekanan situasional terhadap kecenderungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan kecurangan saat mengaudit. APIP yang memiliki level moral tinggi dihipotesiskan tidak akan melakukan kecurangan saat mengaudit meskipun terdapat tekanan situasional. APIP yang memiliki level moral rendah dihipotesiskan akan melakukan kecurangan saat mengaudit jika terdapat tekanan situasional. Untuk menguji hal tersebut dilakukan eksperimen faktorial 2x2 dengan melibatkan 68 mahasiswa Program STAR-BPKP Universitas Jenderal Soedirman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APIP berlevel moral tinggi tidak akan melakukan kecurangan dalam mengaudit meskipun terdapat tekanan situasional. Sementara APIP yang memiliki level moral rendah akan melakukan kecurangan saat mengaudit baik saat terdapat tekanan situasional maupun tidak.

Kata-kata kunci: Kecurangan, Moralitas, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Tekanan Situasional.

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) merupakan momok di sektor privat maupun sektor publik selama puluhan tahun. Berbagai cara telah dilakukan oleh perusahaan maupun oleh pemerintah untuk mencegah dan mengatasi kecurangan. Beberapa cara yang dilakukan diantaranya adalah dengan mengeluarkan serangkaian produk hukum untuk menjerat pelaku dengan hukuman yang berat dan memperkuat fungsi pengawasan. Salah satu unsur pengawasan adalah auditor, baik auditor internal maupun eksternal. Tujuan utama adanya auditor internal adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecurangan dalam organisasi. Selain itu fungsi auditor internal juga untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya.

Menurut ACFE (2009) ada tiga bentuk kecurangan. Ketiganya adalah penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan dan korupsi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Pada tahun 2014, Transparency International melaporkan Indonesia menduduki ranking ke 107 dari 183 negara dengan indeks korupsi tertinggi. Semakin tinggi peringkat korupsi, semakin banyak korupsi terjadi di negara tersebut. Korupsi di sektor pemerintahan menjadi perhatian publik selama bertahun-tahun. Menurut Johnson (2014), pemerintah, baik pusat maupun daerah cenderung mudah melakukan kecurangan karena lingkungan dan cara mereka melaksanakan tugas mereka. Laporan survei dari ACFE (2014) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah adalah sektor kecurangan terbesar kedua dibawah kecurangan eksekutif korporat. Di Indonesia, hasil laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa pada tahun 2014 ada 43 Kepala Daerah yang terjerat isu korupsi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 indeks korupsi meningkat sedangkan indeks anti korupsi menurun. Pada kuartal

pertama tahun 2014, BPK menemukan 670 objek temuan di sektor pemerintahan. Ada sekitar 14.854 kasus ketidakpatuhan senilai Rp30, 87 triliun pada tahun 2014. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan membuat tuntutan publik akan akuntabilitas keuangan pemerintah meningkat. Diperkuatnya sektor pengawasan, baik internal maupun eksternal, merupakan jawaban dari tuntutan publik tersebut.

Schneider (2009), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberadaan fungsi internal audit dalam perusahaan membuat investor semakin percaya akan keakuratan laporan keuangan yang disajikan. Hal ini membuat banyak perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih untuk mengembangkan kapabilitas dan lingkup audit dari auditor internal. Tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan yang diteliti oleh Schneider merupakan salah satu faktor penting tercapainya tujuan dari pembuatan laporan keuangan yaitu sarana pembuatan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Auditor internal dianggap lebih memahami proses bisnis dari perusahaan sehingga kehadirannya dapat menguatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan bisnis tersebut.

Dalam sektor pemerintah di Indonesia, keberadaan auditor internal diatur dalam PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pemerintah memiliki dua badan yang menaungi auditor internal yaitu Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP). Auditor yang berada pada kedua badan tersebut selanjutnya disebut Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Meskipun memiliki dua badan audit internal namun kasus korupsi di pemerintahan masih banyak terjadi.

Dalam beberapa kasus di dunia bisnis, auditor internal seringkali tidak dapat mendeteksi adanya kecurangan atau bahkan beberapa diantaranya melakukan kolusi dengan klien agar beberapa kecurangan yang terjadi tidak dilaporkan. Sedangkan di sektor pemerintahan, menurut

Mardiasmo (2006), 94% auditor pemerintah tidak mampu mendeteksi adanya korupsi. Hasil penelitian Xu (2008), auditor dengan penalaran moral rendah cenderung tertarik dengan sistem insentif ketika akan melaporkan adanya kecurangan dalam perusahaan. Jika melaporkan memberikan keuntungan bagi dirinya, maka ia akan melakukannya. Namun jika melaporkan tidak memberikan keuntungan apapun, ia tidak melakukannya.

Menurut ACFE (2009), ada empat hal yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan. Keempat hal ini dikenal sebagai *The Fraud Diamond*. Keempatnya adalah: rasionalisasi (*rationalization*), kesempatan (*opportunity*), tekanan situasional (*situational pressure*) dan kapabilitas (*capability*). Tekanan situasional merupakan salah satu penyebab kecurangan yang muncul dari luar diri sang pelaku kecurangan. Menurut Thomas dalam Dorminey *et al.* (2011) tekanan situasional dapat berupa uang (*money*), ideologi (*ideology*), koersi (*coercion*) dan ego atau yang lebih dikenal dengan model MICE. Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya seringkali mendapatkan tekanan-tekanan di luar dirinya sehingga memaksa atau membuatnya menyembunyikan kecurangan atau bahkan melakukan kecurangan. Menurut Dorminey (2011), salah satu faktor penyebab kecurangan dimana auditor tidak imun adalah faktor tekanan situasional.

Auditor internal yang berperan sebagai penjaga pertama aset perusahaan seharusnya memiliki integritas yang tinggi jika berhadapan dengan kasus kecurangan dalam organisasi. Jika auditor tidak memiliki integritas, maka berbagai tekanan yang dihadapi dapat membuatnya melakukan kecurangan saat melakukan pekerjaan mengaudit. Imbasnya ia dapat hal-hal seperti kolusi dengan manajemen dengan imbalan tertentu.

Penelitian ini akan mengelaborasi studi mengenai pengendalian internal, kecurangan dan moral. Telah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai ketiganya, namun

belum ada yang mengelaborasinya. Pentingnya pengendalian internal dalam mencegah *whistleblower* yang mengungkap kecurangan (Seitz et al., 2015). Penelitian dari Coram et al. (2008) menyatakan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal lebih mungkin untuk mendeteksi dan melaporkan sendiri terjadinya kecurangan dibandingkan organisasi yang tidak memiliki audit internal.

Hasil dari penelitian Coram et al. (2008) sekaligus memperkuat bukti bahwa adanya audit internal menambah nilai untuk meningkatkan kontrol dan memonitor lingkungan di dalam organisasi sehingga organisasi dapat mendeteksi dan melaporkan sendiri adanya kecurangan. Bell dan Carcello (2000) menemukan bahwa pengendalian internal yang lemah dan perilaku agresif terhadap pelaporan keuangan berkontribusi secara signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Menurut Johnson (2014), ada dua elemen situasional yang berperan penting dalam potensi terjadinya kecurangan: kesempatan (*opportunity*) dan kapasitas. Kesempatan mengacu pada kerentanan pengendalian internal diantaranya Sistem Pengendalian Internal (SPI) termasuk aparatnya yang tidak memadai.

Sementara dari sisi penelitian di ranah penalaran moral, Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachchi (2009) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Menurut Rest dan Narvaez (1994) semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan 'hal yang benar'. Hal ini turut diperkuat dengan penelitian dari Liyanarachi (2009).

Penelitian dari Arnold dan Ponemon (1991) mengungkapkan bahwa auditor internal dengan level moral rendah cenderung tidak melakukan pelaporan ketika ditemukan penyimpangan saat mengaudit. Sementara auditor internal yang memiliki level moral tinggi melakukan hal sebaliknya. Hasil pemetaan kapabilitas Inspektorat, sebagai auditor internal pemerintah, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Tahun 2012 menunjukkan kapasitas dan profesionalisme Inspektorat yang masih lemah. Berdasarkan pemetaan itu, 93,96 persen auditor Inspektorat masih berada dalam level terendah atau level 1 dari lima level yang menjadi dasar penilaian. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan studi untuk mengetahui apakah auditor internal pemerintah melakukan tugasnya dengan baik terlepas dari berbagai faktor seperti moral dan tekanan situasional, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini. Berikut adalah skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

=====Gambar 1 disini=====

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kecurangan (*Fraud*)

IAI (2004) menjelaskan kecurangan akuntansi dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Seksi 316 sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat

laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara pegawai atau pihak ketiga.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi. Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘kecurangan kas’ dan ‘kecurangan atas persediaan dan aset lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*). Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan, termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Penalaran Moral

Teori perkembangan moral yang banyak diacu dalam penelitian etika adalah model Kohlberg. Kohlberg (1969) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-konvensional*. Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil dari beberapa studi yang dipaparkan dalam Liyanarachchi menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Menurut Rest dan Narvaez (1994), semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan ‘hal yang benar’.

Dalam tahapan yang paling rendah (*pre-conventional*), individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada. Selain itu individu pada level moral ini juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Pada tahap kedua (*conventional*), individu akan mendasarkan tindakannya persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Pada tahap tertinggi (*post-conventional*), individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum universal.

Menurut Welton (1994), dalam setiap *stage* Kohlberg, individu memiliki pandangan sendiri mengenai versi ‘hal yang benar’ menurutnya. Individu dalam *stage* 1 merasa bahwa hal yang benar adalah apa yang menjadi kepentingan individu tersebut. Individu dalam *stage* 2 menganggap bahwa hal yang benar adalah hasil dari pertukaran yang imbang, persetujuan

maupun posisi tawar yang imbang. Individu dalam *stage 3* merasa bahwa hal yang benar adalah terkait dengan pengharapan akan kepercayaan, loyalitas, dan respek dari teman-teman dan keluarganya. Individu dalam *stage 4* menganggap bahwa hal yang benar adalah dengan membuat kontribusi untuk masyarakat, grup atau institusi. Individu dalam *stage 5* dan *stage 6* menganggap bahwa kebenaran adalah mendasarkan diri pada prinsip-prinsip etis, persamaan hak manusia dan harga diri sebagai seorang makhluk hidup.

Tekanan Situasional

Berdasarkan studi awal dari Cressey di tahun 1953, ia merumuskan tiga faktor penyebab terjadinya kecurangan, yaitu: rasionalisasi (*rationalization*), kesempatan (*opportunity*), dan tekanan (*pressure*) yang dikenal dengan teori *The Fraud Triangle*. Sementara studi dari ACFE (2010) yang diperkuat dengan Dorminey et al. (2012) menyempurnakan studi Cressey sebelumnya. Penyempurnaannya ada pada faktor tekanan dan penambahan faktor kapabilitas. ACFE menyatakan ada empat faktor penyebab terjadinya kecurangan, yaitu: rasionalisasi (*rationalization*), kesempatan (*opportunity*), tekanan situasional (*situational pressure*) dan kapabilitas (*capability*) dan dikenal sebagai teori *The Fraud Diamond*. Tekanan situasional digunakan untuk menggantikan istilah tekanan yang ada di *Fraud Triangle*. Dalam *Fraud Triangle* tekanan yang dimaksud hanya sebatas tekanan berupa uang. Sedangkan dalam *Fraud Diamond*, tekanan yang dimaksud bisa bermacam-macam dan tidak hanya terbatas pada uang.

Tekanan situasional, menurut Dorminey et al. (2011) terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tekanan situasional penyebab kecurangan ini dikenal dengan akronim MICE (*money, ideology, coercion, dan ego*). Faktor uang (*money*) yang dimaksudkan mengacu pada tekanan finansial yang dialami pelaku sehingga membuat ia melakukan kecurangan. Tekanan finansial itu

dapat diakibatkan gaya hidup yang boros, hutang, kebutuhan keluarga yang mendesak dan lain sebagainya. Sementara faktor ideologi yang dimaksud adalah bahwa pelaku menganggap perilakunya melakukan kecurangan itu adalah untuk kebaikan yang lebih besar. Misalnya ia menganggap mendapat penerimaan ilegal tidak menjadi masalah karena uang itu akan ia sumbangkan ke banyak pihak yang membutuhkan. Faktor koersi (*coersion*) yang dimaksud adalah adanya pihak ketiga yang memberikan contoh, mengintimidasi, mengancam dan memaksa pihak lain untuk melakukan kecurangan. Sedangkan ego mengacu pada perasaan ego individu yang merasa bahwa jika ia melakukan kecurangan tidak akan dapat terdeteksi. Selain itu ego juga dipicu oleh keinginan untuk mempertahankan atau memperoleh gaya hidup tertentu. Kekayaan dan kesuksesan telah menjadi identitas dan juga sebagai pembanding status sosial pada beberapa kalangan. Dorminey et al. (2012) menyatakan bahwa uang dan ego adalah motivasi utama yang menyebabkan orang berbuat curang. Beberapa kasus seperti Madoff, Stanford, Enron, WorldCom, Adelphia dan lain sebagainya adalah contoh bahwa pelaku termotivasi melakukan kecurangan karena ego dan juga uang.

Pengendalian Internal

Menurut Johnson (2014), kerentanan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di suatu organisasi akan berpotensi menimbulkan banyak kecurangan. Coram et al. (2008) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Penelitian Hogan et al. (2008) membahas peranan auditor dalam mengurangi faktor kesempatan (*opportunity*) dalam kecurangan akuntansi. Menurut Bastian (2006), pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi,

metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Definisi sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu:

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menurut PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 49 terdiri atas: Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), Inspektorat Jenderal/nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Menurut Xu (2008), auditor internal cenderung tidak mau melaporkan penyimpangan yang terjadi di organisasi jika tidak ada insentif. Penelitian Xu diperkuat oleh Seitz et al. (2015) yang mengungkapkan pentingnya *award* bagi auditor agar mau melaporkan adanya kecurangan saat mengaudit. Arnold dan Ponemon (1991) menyatakan bahwa auditor internal yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung tidak mau melaporkan jika ada penyimpangan di organisasi. Ponemon kembali membuat penelitian tentang moral auditor kembali pada tahun 1992. Hasil penelitian Ponemon mengungkapkan bahwa tingkat penalaran moral auditor, berhubungan dengan perilaku mereka, termasuk dalam pelaporan hasil auditnya.

Menurut Mardiasmo (2006), sebagian besar korupsi tidak dapat ditemukan saat dilakukan audit internal. Integritas aparat pengawas (auditor) internal dipertanyakan ketika mereka tidak mau melaporkan adanya kecurangan dalam organisasi. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah mereka melakukan kecurangan berupa kolusi dengan manajemen organisasi agar tidak

melaporkan adanya penyimpangan. Perilaku curang sangat berkaitan erat dengan level penalaran moral individu (Puspasari, 2012). Semakin rendah level moral individu, semakin mungkin ia berbuat curang. Faktor-faktor seperti rasionalisasi, kesempatan dan tekanan situasional akan semakin mendukung individu yang memiliki level moral rendah untuk berbuat curang. Sebaliknya, semakin tinggi level moralnya, individu tidak akan melakukan kecurangan terlepas dari apapun tekanan yang dihadapinya. Dari uraian di atas dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Dalam kondisi terdapat tekanan situasional saat mengaudit, APIP berlevel moral tinggi cenderung tidak akan melakukan kecurangan dibandingkan APIP berlevel moral rendah.
- H2: APIP yang memiliki level moral rendah akan melakukan kecurangan dalam kondisi ada tekanan situasional dibandingkan jika tidak ada tekanan situasional.

METODE

Prosedur dan Tugas Partisipan

Peneliti membuat rangkaian prosedur agar eksperimen dapat berjalan lancar dan terarah. Partisipan dibagikan amplop namun mereka tidak diperkenankan membuka amplop sampai semua amplop diterima semua partisipan. Setelah semua partisipan menerima amplop, amplop tersebut dibuka secara bersama-sama.

Di dalam amplop yang diterima partisipan, terdapat dua buah penugasan. Penugasan pertama adalah penugasan mengenai moralitas. Partisipan diminta memberikan pertimbangan tindakan apa yang harus dilakukan terkait empat skenario dilematis. Penugasan pertama ini dilakukan untuk mengukur level moral individu. Instrumen dikembangkan dari *Defining Issue*

Test I (DIT I) yang dikonstruksi oleh Rest (1994). Di akhir penugasan pertama, partisipan akan diminta menjawab pertanyaan cek manipulasi. Tujuan cek ini adalah untuk mengetahui apakah partisipan benar-benar memahami kasus yang ada atau tidak.

Setelah selesai dengan penugasan pertama, lembar penugasan pertama dimasukkan kembali ke dalam amplop. Partisipan kemudian diminta untuk mengerjakan penugasan kedua. Pada penugasan kedua, partisipan diberikan kasus mengenai seorang auditor internal junior pemerintah yang menghadapi dilema saat melakukan audit. Skenario eksperimen dalam penugasan kedua ini menggunakan konteks orang ketiga (*third-person context*) seperti yang disarankan oleh Rest (1986) dalam Liyanarachi (2009) untuk penelitian-penelitian etika. Hal ini diperkuat dengan penelitian-penelitian etika yang dilakukan oleh Arnold dan Ponemon (1991), dan Bernardi dan Guptill (2008) yang menggunakan konteks orang ketiga. Dalam perancangannya, peneliti dibantu oleh tim dari BPKP dan Inspektorat yang telah berpengalaman mengaudit sebelumnya. Terdapat dua perlakuan yang berbeda dalam penugasan ini. Kedua perlakuan itu adalah ada dan tidak adanya tekanan situasional. Sebagian partisipan diberikan perlakuan ada tekanan situasional, sebagian yang lain diberikan perlakuan tidak ada tekanan situasional. Pemberian perlakuan dilakukan secara acak. Penugasan kedua ini dilakukan untuk mengukur kecenderungan partisipan melakukan kecurangan saat mengaudit.

Partisipan

Partisipan dalam penelitian eksperimen ini adalah mahasiswa Program STAR-BPKP UNSOED. Alasan pemilihan sampel ini adalah karena keseluruhan mahasiswa adalah pegawai instansi pemerintah yang berkecukupan di bidang keuangan, termasuk diantaranya auditor internal sehingga tidak sulit bagi partisipan membayangkan ada di dalam kondisi yang dieksperimentasikan.

Faktor kemiripan latar belakang ini juga yang membuat eksperimen ini lebih riil. Total sebanyak 68 mahasiswa Program STAR-BPKP terlibat.

Desain Eksperimen

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen faktorial 2x2 untuk menguji pengaruh moralitas individu dan tekanan situasional terhadap kecenderungan melakukan kecurangan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan akuntansi, sedangkan variabel independennya adalah moralitas individu (level moral tinggi dan rendah) dan tekanan situasional (ada dan tidak ada tekanan situasional).

Peneliti mengamati kecenderungan individu melakukan kecurangan akuntansi dengan membagi partisipan ke dalam empat grup: (1) Grup 1: kelompok level moral tinggi dalam kondisi ada tekanan situasional, (2) Grup 2: kelompok level moral rendah dalam kondisi ada tekanan situasional, (3) Grup 3: kelompok level moral tinggi dalam kondisi tidak ada tekanan situasional, dan (4) Grup 4: kelompok level moral rendah dalam kondisi tidak ada tekanan situasional. Desain eksperimen dapat dilihat pada tabel 1.

===== **Tabel 1 Disini** =====

Variabel dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu kecenderungan melakukan kecurangan. Menurut ACFE, ada tiga jenis kecurangan akuntansi, yaitu: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva, dan korupsi. Variabel kecurangan akuntansi diukur dengan meminta partisipan untuk memberikan pendapatnya dalam pertanyaan yang mewakili ketiga jenis kecurangan akuntansi. Partisipan menjawab pertanyaan tersebut setelah membaca

skenario eksperimen. Skala Likert 1–7 digunakan untuk mengukur respons dari partisipan. Semakin tinggi partisipan memberikan angka penilaiannya, semakin cenderung ia berbuat curang.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah moralitas individu (level moral tinggi dan rendah) dan tekanan situasional (ada dan tidak ada tekanan situasional). Pengukuran moralitas individu berasal dari model pengukuran moral yang dikembangkan oleh Kohlberg (1969) dan Rest (1994) dalam bentuk instrumen *Defining Issues Test* (DIT). Instrumen ini berbentuk kasus dilema etika. Pembagian skor level penalaran moral (tinggi dan rendah) menggunakan nilai median *P-score* dari total sampel.

Pengukuran variabel tekanan situasional terdiri dari dua skema dalam skenario: ada tekanan situasional dan tidak ada tekanan situasional. Menurut ACFE, tekanan situasional dapat dibagi empat: uang (*money*), ideologi (*ideology*), koersi (*coercion*), dan ego (*ego*). Keempatnya dikenal dengan akronim MICE. Dalam salah satu penugasan eksperimen ini dua jenis tekanan situasional digunakan yaitu uang dan koersi. Sementara skenario dalam penugasan yang lain tidak diceritakan terdapat tekanan situasional.

HASIL

Cek Manipulasi

Cek manipulasi dilakukan dengan menguji partisipan untuk menentukan benar atau salah dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai tugas partisipan selaku auditor di Inspektorat Jenderal X. Pertanyaan kedua adalah mengenai gambaran umum organisasi di Inspektorat Jenderal X. Hasil analisis cek manipulasi menunjukkan bahwa dari 68 partisipan, hanya sebanyak 59 partisipan (86,8%) yang lolos cek manipulasi.

Hasil Eksperimen

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. Hasil pengujian normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig* 0,054 (diatas 0,005), dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa data terdistribusi dengan normal sehingga memenuhi salah satu asumsi *analysis of variance* (ANOVA). *Tests of homogeneity of variance* dilakukan untuk mengetahui apakah keempat grup (Grup 1,2,3, dan 4) mempunyai varian yang berbeda. Hasil uji statistik menunjukkan nilai *levene statistic* sebesar 0,148 (diatas 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok subjek memenuhi varian yang sama sehingga telah memenuhi asumsi ANOVA (Hair et al, 2006). Sedangkan untuk uji *Analysis of Variance-Between Groups* menunjukkan *p-value* signifikan pada 0,008. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antar grup. Untuk menjawab hipotesis, dibawah ini akan ditampilkan tabel level moral individu dan tekanan situasional terhadap kecenderungan melakukan kecurangan saat mengaudit dan deskripsi statistik untuk melihat perbedaan antar grup.

===== **Tabel 2 Disini** =====

===== **Tabel 3 Disini** =====

Hipotesis pertama menyatakan bahwa dalam kondisi terdapat tekanan situasional saat mengaudit, APIP berlevel moral rendah cenderung melakukan kecurangan dibandingkan APIP berlevel moral tinggi. Jika kita lihat pada Tabel 3, hipotesis ini berarti membandingkan antara Grup 1 dan Grup 2. Tabel 3 menunjukkan perbedaan *mean* tiap grup dengan level moral tertentu dan kondisi elemen pengendalian internal tertentu. Untuk mengetahui perbedaan *mean* grup yang signifikan, maka dilakukan analisis *post-hoc*. Analisis *post-hoc* ada dalam Tabel 4 berikut ini.

=====Tabel 4 disini=====

Berdasarkan Tabel 4 *Tukey t-statistic*, peneliti membandingkan antara *mean* Grup 1 dan Grup 2. Terdapat perbedaan signifikan antara mean 1 dan 2 sebesar -1.420 dengan standar deviasi 0,4130 dan *p-value* 0,006. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa dalam keadaan terdapat tekanan situasional, APIP yang memiliki level moral rendah cenderung melakukan kecurangan saat mengaudit dibandingkan dengan APIP yang memiliki level moral tinggi. Dengan demikian hipotesis pertama didukung.

Hasil penelitian ini membuktikan apa yang ada dalam hirarki tahap perkembangan moral Kohlberg. Semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan *post-konvensional*), semakin individu tersebut memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya. Semakin tinggi level moral individu, semakin ia berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi yang akan merugikan banyak pihak.

Individu dengan level penalaran moral tinggi di dalam tindakannya akan memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitarnya dan mendasarkan tindakannya pada prinsip-prinsip moral, maka ada atau tidak adanya elemen pengendalian internal tidak akan membuatnya melakukan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat hasil dari penelitian-penelitian etika yang sebelumnya dilakukan oleh Liyanarachi (2009), Arnold dan Ponemon (1991), Welton (1994), Graham (1995) dan Patterson (2001) dalam Maroney (2008) bahwa individu yang memiliki level penalaran moral tinggi akan lebih sensitif terhadap isu-isu etika, sehingga akan cenderung melakukan perbuatan yang etis.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa APIP yang berlevel moral rendah cenderung akan melakukan kecurangan saat terdapat tekanan situasional dan tidak akan melakukan kecurangan saat tidak terdapat tekanan situasional. Hipotesis ini membandingkan *mean* antara Grup 2 dan Grup 4. Dari perbandingan antara kedua grup seperti yang terlihat pada Tabel 3 dan 4, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Grup 2 dan 4 (*mean difference* antar grup 0.857 dengan *p-value* 0.197). Ini artinya baik dalam kondisi ada maupun tidak ada tekanan situasional, APIP yang memiliki level moral rendah akan tetap melakukan kecurangan saat mengaudit.

Hasil tersebut memperkuat studi-studi sebelumnya bahwa individu yang memiliki level moral rendah cenderung akan melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri (Kohlberg, 1969., Arnold dan Ponemon, 1991., Rest, 1994., Liyanarachi, 2009., Xu, 2008., Puspasari dan Suwardi, 2012). Ternyata, faktor tekanan situasional sebagai salah satu penyebab yang disinyalir membuat APIP berlevel moral rendah melakukan kecurangan tidak terbukti. Ada maupun tidak adanya tekanan situasional tetap membuat APIP berlevel moral rendah melakukan kecurangan. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain selain tekanan situasional yang dapat membuat individu berlevel moral rendah melakukan kecurangan.

Menurut McPhail (2009) faktor lain yang dapat menyebabkan individu berbuat tidak etis adalah atribut individual (umur, gender, kebangsaan, kedewasaan moral). Studi ACFE Tahun 2009 menemukan bahwa pria lebih banyak melakukan kecurangan dibandingkan wanita (59% berbanding 41%). Pada penelitian ini, demografis gender didominasi oleh pria sebanyak 84,3%. Ini mungkin adalah salah satu penyebab APIP pria yang memiliki level moral rendah, tetap melakukan kecurangan saat mengaudit baik dalam kondisi terdapat tekanan situasional maupun tidak.

Dalam model MICE, ada empat bentuk tekanan situasional yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan. Keempatnya adalah uang (*money*), ideologi (*ideology*), koersi (*coercion*), dan ego (*entitlement*). Dalam penelitian ini, ada dua tekanan situasional yang digunakan sebagai manipulasi dalam eksperimen yaitu uang dan koersi. Terdapat tekanan situasional lain berupa ego individu yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Ego individu ini menurut Betts (2009), bisa berupa perasaan ingin mengalahkan sistem, arogan, tidak stabil secara emosi, dan tidak puas terhadap tempat kerja. Dari hasil penelitian Betts untuk ACFE (2009), sebagian besar pelaku adalah pria pada kisaran umur 30-45 tahun. Secara demografis, baik gender maupun umur partisipan dalam penelitian ini (usia partisipan 30-45 tahun sebanyak 79%) sama dengan kriteria pelaku studi Betts. Dapat disimpulkan bahwa APIP yang memiliki level moral rendah ada dalam rentang umur sebagian besar pelaku kecurangan karena ego individu dalam rentang umur itu cukup tinggi. Sehingga ada atau tidak adanya tekanan situasional sebagai pemantik individu berlevel moral rendah melakukan kecurangan tidak cukup berarti.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan kecenderungan APIP melakukan kecurangan saat mengaudit dalam kondisi ada dan tidak ada tekanan situasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa APIP yang memiliki level moral tinggi cenderung tidak akan melakukan kecurangan saat mengaudit meskipun dalam kondisi terdapat tekanan situasional. Sebaliknya, APIP yang memiliki level moral rendah akan melakukan kecurangan saat mengaudit jika dihadapkan dalam kondisi terdapat tekanan situasional. Kondisi ada dan tidak adanya tekanan situasional ternyata tidak mempengaruhi APIP yang memiliki level moral rendah untuk tetap melakukan kecurangan saat mengaudit.

Ada beberapa implikasi penting dari penelitian ini. Kecurangan saat mengaudit masih mungkin terjadi karena tidak semua auditor internal memiliki level penalaran moral yang tinggi. Untuk mengantisipasi auditor internal yang memiliki level moral rendah, lembaga terkait perlu mereduksi faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan kecurangan. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan saat mengaudit dengan sistem yang memadai, memberikan pelatihan-pelatihan tentang etika profesi, memberikan *award* bagi auditor yang dapat melaporkan terjadinya kecurangan dan memberikan hukuman (*punishment*) yang sangat berat jika terbukti melakukan kecurangan saat mengaudit.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, tekanan situasional yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah uang dan koersi. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan dua bentuk tekanan situasional lainnya dalam manipulasi eksperimen yaitu ego dan ideologi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memasukkan variabel-variabel yang terkait demografis responden (gender, posisi di organisasi, pengalaman bekerja, usia, dan pendidikan) untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kecenderungan APIP melakukan kecurangan saat mengaudit. Kedua, Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program STAR-BPKP UNSOED, semuanya adalah pegawai pemerintah yang berhubungan dengan keuangan, namun tidak semuanya adalah auditor internal sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir untuk auditor internal.

DAFTAR PUSTAKA

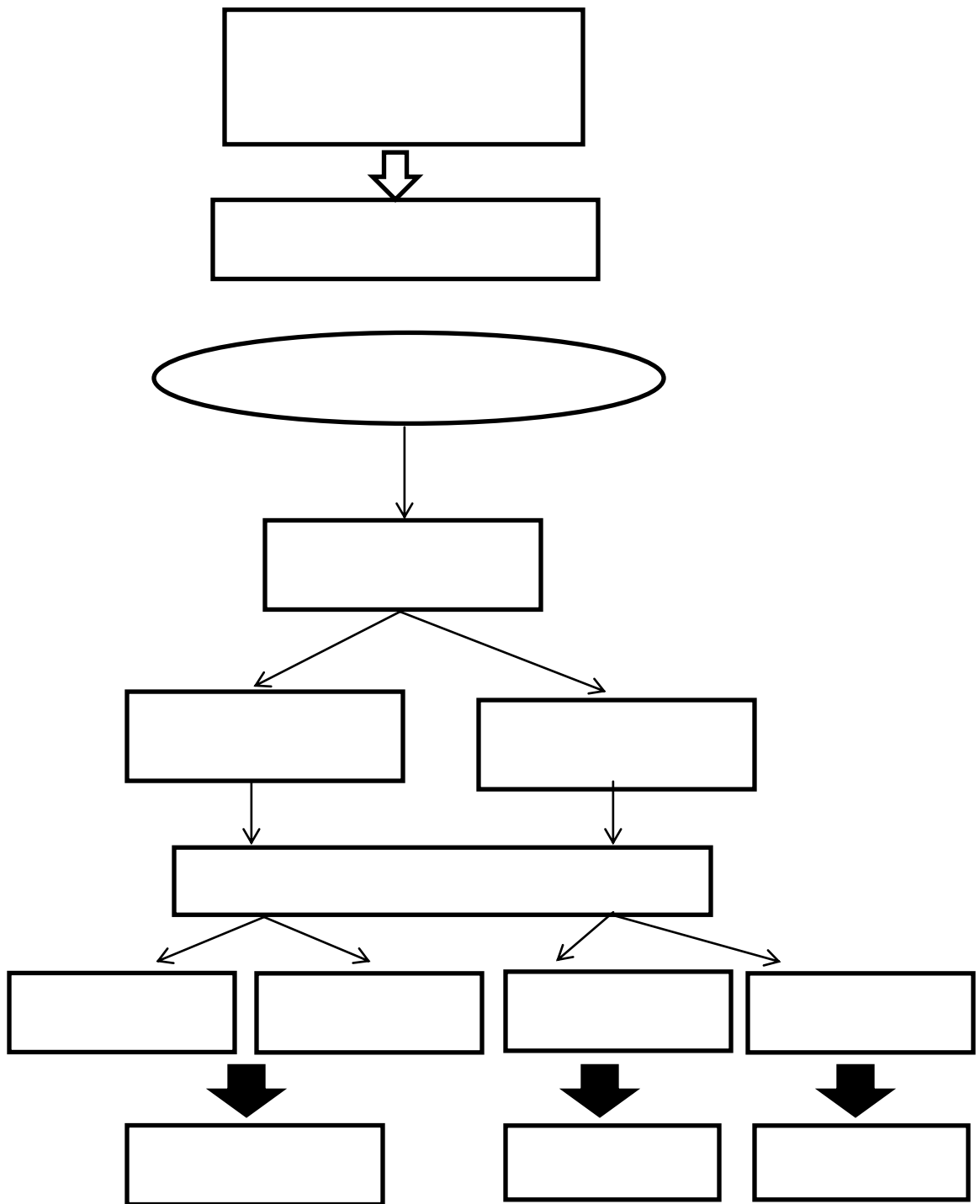
- Association of Certified Fraud Examiners. 2009. *Managing The Business Risk of Fraud: A Practical Guide*.
- Association of Certified Fraud Examiners. www.acfe.com diakses pada 10 Februari 2015
- Arnold, D. dan L. Ponemon. 1991. *Internal auditors' perceptions of whistle-blowing and the influence of moral reasoning: an experiment*. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 10 (2): 1-16.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. www.bpk.go.id diakses pada 16 April 2015
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. www.bpkp.go.id diakses pada 23 Maret 2015
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Abstraksi Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008*.
- Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id diakses pada 16 April 2015
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bell, T. B dan J. V Carcello. 2000. *A Decision Aid For Assesing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting*. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* (Spring): 167-182.
- Bernardi, R. dan S. Guptill. 2008. *Social Desirability Response Bias, Gender and Factors Influencing Organizational Commitment: An International Study*. *Journal of Business Ethics*.
- Betts, Doug. 2009. *The Psychology of Fraud: What Makes Employee Cross The Line?*. Joint ACFE/ISACA.
- Coram, P. Ferguson, C. dan Moroney, R. 2008. *Internal Audit, Alternative Internal Audit Tructures And The Level Of Misapropriation Of Assets Fraud*. *Accounting and Finance* 48: 543-559.
- Dorminey, J., A. S. Fleming., M. J. Kranacher, dan R. A. Riley. 2012. *The Evolution of Fraud Theory*. *Issues in Accounting Education* 27 (2): 555-579.
- Dorminey, J., A. S. Fleming., M. J. Kranacher, dan R. A. Riley. 2011. *Beyond The Fraud Triangle. Enhancing Deterrence of Economic Crimes*. *CPA Journal*. 16-25

- Hair, J. F. 2006. *Multivariate Data Analysis*. Prentice Hall.
- Hogan, C. E., Z. Rezaee., R. A. Riley., dan U. K. Velury. 2008. *Financial Statement Fraud: Insights From The Academic Literature*. Auditing: A Journal of Practice and Theory 27.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. SA Seksi 316*. Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan.
- Indonesian Corruption Watch. www.antikorupsi.org diakses pada 19 Mei 2015
- Johnson, Grace F, Hartong Rachel, dan Brittany Kidd. 2014. *Three Essentials Internal Controls for Public Sector Entities*. Journal of Government Financial Management (Winter): 47-51.
- Kohlberg, Lawrence. 1969. *Stage and Sequence. Handbook of Socialization Theory and Research*. McGraw Hill: New York.
- Liyanarachi, G dan C. Newdick. 2009. *The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New-Zealand Evidence*. Journal of Business Ethics 89.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Menuju Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan vol.2
- Mc Phail, K. dan D. Walters. 2009. *Accounting and Business Ethics*. Routledge: London dan New York.
- Puspasari, Novita dan Eko Suwardi. 2012. *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
- Rest, J dan Narvaez, D. 1994. *Moral Development in The Professions: Psychology and Applied Ethics*. Hillsdale, NJ : Erlbaum.
- Schneider, A (2009). *The Roles of Internal Audit in Complying With Sarbanes-Oxley Act*. Journal of Disclosure and Governance 6 (1) : 69-80.
- Seitz, Jamike, Oeding, Jill, dan Michael Wiese. 2015. *Is It Ethical For The U.S. Government To Offer Financial Awards To Potential Whistleblowers Of Financial Statement Fraud And Internal Control Violations?*. Journal of Theoretical Accounting Research : 69-80.
- Transparency International. www.transparency.org diakses pada 19 Mei 2015
- Wells, J. T. 2007. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection: Second Edition*. John Wiley and Sons Inc.

Welton, R. E., J. R Davis dan M. LaGroune. 1994. *Promoting The Moral Development Of Accounting Graduate Students*. Accounting Education. International Journal 3.

Xu, Yin dan D.E. Ziegenfuss. 2008. *Reward Systems, Moral Reasoning, and Internal Auditors' Whistle-Blowing Wrongdoing Behavior*. Journal of Business and Psychology.

LAMPIRAN



Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

Level Penalaran Moral	Tekanan Situasional	
	Ada	Tidak ada
Tinggi	Grup 1	Grup 3
Rendah	Grup 2	Grup 4

Tabel 1. Desain Eksperimen 2x2

Source	Df	Mean Square	F	Sig	Partial Eta Squared
Corrected model	3	5.553	4.360	0.008	0.192
Intercept	1	367.221	288.318	0.000	0.840
Moral	1	10.871	8.535	0.005	0.134
Tek.situasional	1	1.300	1.021	0.134	0.018
Moral*Tek.situasional	1	4.608	3.618	0.032	0.062
Error	55				
Adj R Squared=0.148					

Tabel 2. Pengaruh Level Moral dan Tekanan Situasional Terhadap Kecenderungan *Fraud*

Level Penalaran Moral	Tekanan Situasional	
	Ada	Tidak ada
Tinggi	Grup 1 Mean: 1.937 SD: 1.1236 N: 16	Grup 3 Mean: 2.200 SD: 1.3732 N: 15
Rendah	Grup 2 Mean: 3.357 SD: 0.8419 N: 14	Grup 4 Mean: 2.500 SD: 1.019 N:14

Tabel 3. Deskripsi Statistik Grup

	Mean Difference (I-J)	Standard Error	P-Value
Grup 1 dan Grup 2	-1.420 ^c	0.4130	0.006
Grup 2 dan Grup 4	0.857	0.4266	0.197

Tabel 4. Tukey *t*-statistic

Skenario Dengan Tekanan Situasional

Dion adalah seorang auditor junior di Inspektorat Jenderal Kementerian X. Dion memiliki 3 orang anak dan istrinya adalah ibu rumah tangga.

Dion baru bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian X selama tiga bulan. Di kantor, Dion memiliki 80 rekan kerja. Beberapa diantaranya adalah auditor junior seperti dirinya dan beberapa lagi adalah auditor yang cukup senior.

Baru-baru ini, Dion ditugaskan dalam sebuah tim untuk mengaudit Dinas X di Kabupaten Y, instansi vertikal dari Kementerian X tersebut. Selama proses audit, Dion banyak menemui kejanggalan-kejanggalan terkait penggunaan dana untuk proyek Pembangunan Infrastruktur Perdesaan berupa Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Bronjong Penahan Dinding Sungai dengan nilai proyek sebesar 3 Miliar. Kejanggalan yang ditemui di lapangan di antaranya:

1. Jalan yang dibangun sebagian rusak.
2. Hingga saat audit, jembatan belum selesai dibangun, padahal kontrak berakhir 31 Desember 2014.
3. Sebagian pengeluaran tidak didukung bukti.
4. Sebagian SPJ fiktif dan tidak dapat diyakini kebenarannya.

Saat pembicaraan hasil audit antara tim audit dan auditan, Dion dan tim diundang makan siang di sebuah restoran mewah oleh Kepala Dinas X. Saat makan siang selesai, sang Kepala Dinas menyelipkan amplop kepada tim audit sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan pembinaan kepada instansi yang dipimpinnya. Dalam kesempatan itu pula, Kepala Dinas meminta tolong tim audit agar tidak memasukkan temuan yang nilainya cukup material ke dalam Laporan dan Berita Acara Hasil Audit.

Dion terkesiap karena kaget dengan pemberian tersebut. Dengan sedikit basa-basi dan tanpa sungkan, Ketua Tim dan teman-temannya justru menerima amplop tersebut.

Keesokan harinya, Dion bertanya kepada Ketua Tim Audit perihal amplop cukup tebal berisi sejumlah uang yang diterimanya. Ketua Tim mengatakan bahwa hal itu lazim terjadi sebagai bentuk terima kasih dan silaturahmi dan menyarankan Dion menerimanya tanpa banyak bertanya.

Dion bimbang, apakah yang akan dipertahankan: idealitas atau realitas. Dion sadar bahwa uang tersebut tidak layak ia terima. Menerima uang tersebut adalah tanda bahwa ia ikut memperburuk sistem. Namun masalah di keluarganya mendorong ia menerima uang tersebut. Dion sedang sangat membutuhkan uang untuk biaya operasi ibunya. Dion adalah anak pertama di keluarganya sementara kedua adiknya masih duduk di perguruan tinggi, sehingga Dion juga menyokong perekonomian keluarga besarnya. Sementara di rumah tangganya sendiri, ia menjadi tulang punggung keluarga. Anak pertama Dion akan masuk Sekolah Dasar beberapa bulan lagi. Dion belum memiliki dana untuk keperluan sekolah anak sulungnya.

Setelah membaca latar belakang diatas, berikan jawaban anda pada pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda 'X':

Terkait dengan uang dalam amplop yang diberikan, Dion sebaiknya.....

**Sangat Tak Setuju
Menerima**

**Sangat Setuju
Menerima**

1

2

3

4

5

6

7